

**KEBIJAKAN IMPOR BERAS INDONESIA-VIETNAM
ERA PRESIDEN JOKO WIDODO (2014-2018)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*

AGIT YUMA YUSUF

1 5 1 0 8 5 1 0 1 4



Pembimbing I : Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si

Pembimbing II : Maryam Jamilah, S.IP, M.Si

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pembuatan kebijakan impor beras Indonesia dari Vietnam pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Pro dan kontra terhadap kebijakan impor beras terus terjadi setiap tahunnya, dimulai dari masyarakat terutama yang berada pada sektor pertanian akibat merasa dirugikan oleh kebijakan impor beras hingga di dalam badan pemerintah yang sering mengalami perbedaan pendapat terutama dalam persoalan data statistik stok beras nasional (SBN). Sehingga, penelitian ini akan melihat bagaimana proses pengambilan kebijakan impor beras menggunakan konsep *Bureaucratic Politics Model* (BPM) oleh Graham Allison dengan 3 indikator yaitu *stand-sit*, *bargaining*, dan *resultant preposition*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan posisi dan daya tawar dari masing-masing kementerian yang menjadi pilar didalam pengambilan kebijakan impor beras tersebut, Kementerian Perdagangan menjadi pilar yang memiliki posisi dan daya tawar yang paling kuat dalam proses pengambilan kebijakan impor beras Indonesia dari Vietnam dengan kepentingan Kementerian Perdagangan sebagai stabilitator harga komoditas pangan, serta memiliki *privillage* langsung berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dalam mengatur mekanisme ekspor-impor di Indonesia terutama dalam kebijakan impor komoditas beras.

Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri, Impor Beras, *Bureaucratic Politics Model*



ABSTRACT

This research aims to analyze the process of decision making proses of Indonesian rice imports policy that imported from Vietnam in the era of President Jokowi's administration. The pros and cons of rice import policy occur every year, especially the community those in the agricultural sector due to feeling disadvantaged by rice import policies, so that government agencies often experience differences of opinion, especially in the matter of national rice stock statistics (SBN). So, this research will analyze the process of rice import policy using concept of Bureaucratic Politics Model (BPM) by Graham Allison with 3 indicators they are Stand-sit, Bargaining, dan Resulting Preposition. This research uses qualitative methods and data collection techniques specifically literature studies. The results of this study are based on the position and bargaining power of each ministry which is a pillar in making rice import policy, the Ministry of Trade is the pillar that has the strongest position and bargaining power in the process of taking rice import policy from Vietnam with the interests of the Ministry of Trade as price stabilizers food trade, also has direct privillage based on the Minister of Trade Regulation (Permendag) in Indonesia related to the rice import policy.

Keywords: Foreign Policy, Rice Imports, Bureaucratic Politics Model

